

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kualitas APBD DKI Dipertaruhkan

Kualitas APBD DKI 2020 dihadapkan pada atenggat waktu pembahasan yang hanya sembilan hari. Sisa waktu ini juga belum diikuti dengan terbukanya akses publik untuk ikut mengawasi anggaran.

JAKARTA, KOMPAS — Batas waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2020, yakni 11 Desember 2019, tinggal sembilan hari lagi. Selasa (3/12/2019) ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan APBD DKI 2020 ke DPRD.

Agenda penyampaian Raperda ini semula dijadwalkan pada Senin pukul 10.00. Namun, ada pergeseran jadwal menjadi Selasa karena anggota Dewan mengikuti bimbingan teknis.

Meski ada pergeseran jadwal, Sekretaris DPRD DKI M Yuliadi meyakini, penetapan Perda APBD DKI 2020 tetap dilakukan 11 Desember.

"Ada sehari yang jadi dua agenda untuk mempersingkat waktu. Jadi, bisa cepat selesai," ujar Yuliadi.

Dua agenda yang dipadatkan menjadi satu hari adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD DKI 2020 dan penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi. Sebelumnya, dua agenda itu berlangsung di hari yang berbeda.

Sebagai gambaran, rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terbagi dalam delapan buku dengan tebal total 2.957 halaman. Dalam buku itu, termuat kegiatan atau program sepanjang tahun 2020. Program hingga ke tingkat kecamatan/kelurahan itu dibahas di lima komisi DPRD.

Tercatat ada lebih dari 23.000 kegiatan pada tahun depan dengan lebih dari 270.000 komponen yang harus dibahas eksekutif dan legislatif.

KUA-PPAS merupakan awal dari mata anggaran dalam Raperda APBD yang pembahasannya dimulai dengan pidato Gubernur, Selasa ini.

Keterbukaan

Pemerintah DKI Jakarta juga menunda lagi janji mengunggah dokumen KUA-PPAS di situs apbd.jakarta.id. Pengunggahan dokumen tertunda karena proses *input* komponen belum selesai.

"Sekarang dalam proses penyelesaian (*input* komponen). Jadi, masih ada tambah, kurang," ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Suharti, Senin, di Jakarta.

Menurut Suharti, ada sejumlah kegiatan kerja yang harus disesuaikan dengan rapat Badan Anggaran DKI terakhir, Rabu (27/11). Dengan alasan itu, dokumen anggaran belum bisa diunggah meski KUA-PPAS ini telah disepakati Pemprov DKI dan DPRD pada Kamis (28/11).

Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Saefullah dan mantan Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Wirawan menjanjikan dokumen anggaran segera diunggah setelah disepakati sebagai KUA-PPAS.

Suharti berjanji kembali, KUA-PPAS akan diunggah Selasa sebelum Gubernur Anies menyampaikan Raperda APBD 2020.

"Besok pada waktu Gubernur pidato, mestinya, sih, sudah selesai (proses *input*). Kemarin *weekend* sampai tengah malam (*input* komponen), tetap saja jalan terus," ucap Suharti.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan, penganggaran harus terbuka dan transparan untuk umum.

Subsidi transportasi

Dalam KUA-PPAS yang ditelaah sepakati, alokasi anggaran subsidi (PSO) transportasi untuk tiga moda pada 2020 susut Rp 1,1 triliun.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Senin, menjelaskan, PSO transportasi yang diusulkan dalam

KUA-PPAS Rp 5,662 triliun. Angka itu diturunkan menjadi Rp 4,55 triliun dalam pembahasan KUA-PPAS.

Akibatnya, PSO untuk penggunaan bus Transjakarta turun dari Rp 4,197 triliun menjadi Rp 3,291 triliun. Alokasi PSO untuk penumpang MRT Jakarta dari usulan Rp 938,5 miliar menjadi Rp 825 miliar. PSO penumpang LRT dikurangi dari Rp 527,5 miliar menjadi Rp 439,6 miliar.

Syafrin melanjutkan, PSO dihitung untuk kebutuhan subsidi selama 10 bulan. Sisanya akan diperjuangkan kembali dalam pembahasan APBD Perubahan 2020. Syafrin memastikan, tidak ada perubahan tarif angkutan yang dibayarkan masyarakat.

Perjalanan dinas

Di sisi lain, Gubernur Anies melonggarkan aturan perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Jumlah rombongan perjalanan dinas kini bisa lebih dari lima orang atas persetujuan gubernur atau sekretaris daerah.

Selain itu, istri/suami dari gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah, yang melakukan perjalanan dinas terkait jabatan yang diembannya (*ex-officio*) dan ditugaskan oleh pemerintah daerah, dapat diberikan semua komponen biaya perjalanan dinas dengan menyesuaikan golongan jabatan suami/istri yang bersangkutan.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2019 yang ditandatangani Anies pada 6 November 2019.

Dalam pergub sebelumnya, yakni Pergub Nomor 107 Tahun 2013, perjalanan dinas dalam dan luar negeri secara rombongan paling banyak lima orang, termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

Dalam pergub sebelumnya, istri/suami dari gubernur, wakil

gubernur, dan sekretaris daerah yang melakukan perjalanan dinas dapat diberikan biaya transportasi pulang-pergi, visa, *airport tax*, dan asuransi perjalanan.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi, kemarin, mengatakan, perubahan pergub bertujuan mengakomodasi perjalanan dinas yang membutuhkan jumlah rombongan lebih besar.

Kegiatan yang memungkinkan lebih dari lima orang dalam satu rombongan, misalnya, berkaitan dengan olahraga dan kebudayaan.

(BOW/HLN/IRE)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kualitas APBD DKI Dipertaruhkan

Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (triliun rupiah)

Pendapatan



Belanja

(surplus/defisit)



Pembiayaan

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Penerimaan pembiayaan	4,45	3,75	4,93	6,48	9,46	7,59	9,21	5,61	8,71	17,44
Pengeluaran pembiayaan	0,44	0,31	0,33	0,83	3,09	4,46	5,45	4,56	9,30	7,51
Pembiayaan neto	4,01	3,44	4,60	5,64	6,38	3,14	3,76	1,05	-0,59	9,93
Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa)	3,76	4,91	6,47	9,46	7,59	9,16	4,93	7,71	13,17	9,76

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---

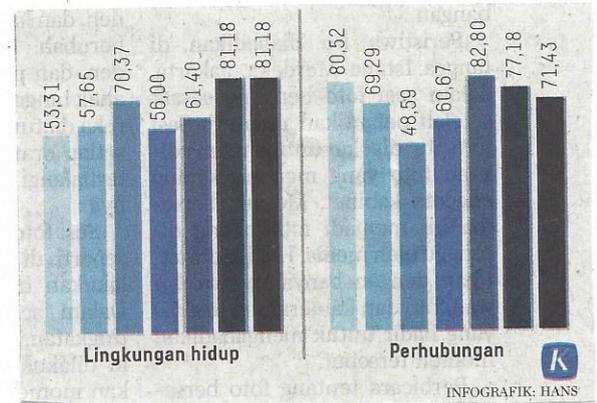


SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

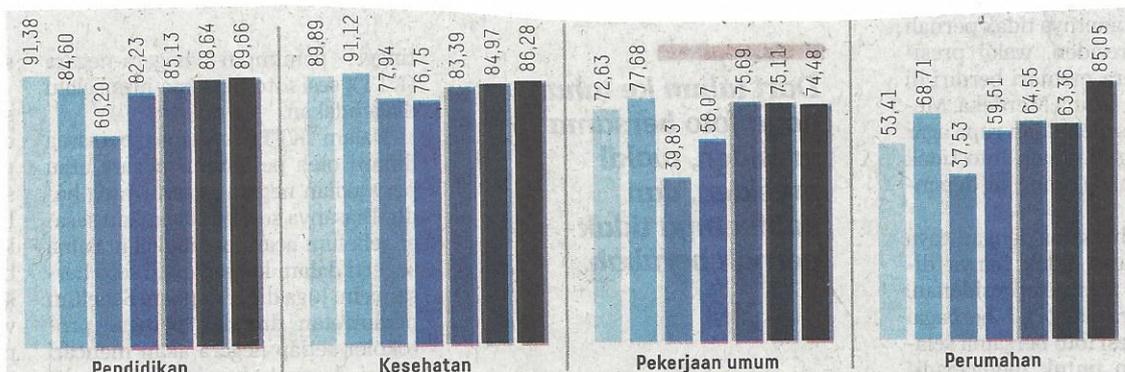
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Kualitas APBD DKI Dipertaruhkan



Rasio Pencapaian Sejumlah Urusan Wajib Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (persen)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; Diolah oleh Litbang Kompas/IWN